

Strategi Penguatan UMKM dan BUMD melalui Produk Halal dalam Pemulihan Ekonomi di Sumatera Utara

Laila Afni Rambe, Sera Padia, Indah Amalia, Abdurrahman

Institut Agama Islam Rokan, Riau, Indonesia

Email: lailaafnirambe20@gmail.com; serapadiap@gmail.com, indaham44@gmail.com,
abdurrahman656454267@gmail.com

Abstract

The Covid-19 condition that paralyzed the Indonesian economy, including Sumatera Utara, had a significant impact on people's welfare and sustainable economic development. The weakening of all sectors of regional revenue sources requires an economic recovery strategy that is able to provide new breakthroughs in overcoming economic problems. Economic recovery is carried out through new innovations with collaboration or cooperation between BUMD and UMKM. The collaboration between these two institutions is carried out by looking at the potential for economic development if BUMD and UMKM support each other compared to the two individual mobile institutions. In addition, the role of UMKM which provide a sizeable GDP of 61% and will absorb 97% of the workforce will be very able to encourage the development of BUMD in each region as well as being a solution to alleviating unemployment due to the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to see what strategies need to be carried out in the community economic recovery plan in West Java Province. This research was conducted from September 2020 to April 2021. To achieve the research objectives, the authors used library research methods, namely by examining documents both officially published and unpublished and supported by research results from previous researchers relevant to this research. Furthermore, in analyzing the data that has been obtained, the author uses a qualitative descriptive method. From the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that there is a need for collaboration or cooperation between BUMD and UMKM in the development of halal products in West Java. This policy was carried out considering the increasing acceptance of halal products. In addition, this policy needs to be supported by the local government in the form of capital support and simplification of licensing so that the people's economy is growing.

Keywords: *Covid-19, Economy, Strategy, UMKM, Halal Product.*

Abstrak

Kondisi *Covid-19* yang melumpuhkan perekonomian Indonesia, termasuk Sumatera Utara berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melemahnya semua sektor sumber pendapatan daerah mengharuskan dilakukannya suatu strategi pemulihan ekonomi yang mampu memberikan terobosan baru dalam mengatasi masalah ekonomi. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui inovasi baru dengan kolaborasi atau kerjasama antara BUMD dan UMKM. Kolaborasi kedua lembaga ini dilakukan dengan melihat besarnya potensi perkembangan ekonomi apabila BUMD dan

UMKM saling mendukung dibandingkan kedua lembaga bergerak individual. Selain itu peran UMKM yang memberikan cukup besar PDB yakni sebesar 61% dan akan menyerap 97% tenaga kerja akan sangat mampu mendorong pengembangan BUMD pada setiap daerah sekaligus menjadi solusi pengentasan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi apa saja yang perlu dilakukan dalam rencana pemulihan ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 hingga April 2021. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan secara resmi serta didukung oleh hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya dalam menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kolaborasi atau kerjasamaantara BUMD dan UMKM dalam pengembangan produk halal di Sumatera Utara. Kebijakan ini dilakukan mengingat penerimaan produk halal yang terus meningkat. Di samping itu, kebijakan ini perlu didukung oleh pemerintah daerah dalam bentuk dukungan modal serta penyederhanaan perizinan sehingga ekonomi rakyat semakin berkembang.

Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi, Strategi, UMKM, Produk Halal

PENDAHULUAN

Kondisi Indonesia yang dihadapkan dengan *Covid-19* sejak bulan Maret lalu hingga pertengahan tahun 2020 ini, telah melumpuhkan beberapa sektor yang sangat krusial bagi seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara. Mengutip penjelasan dari Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, bahwa Virus *Covid-19* atau *Covid-19* adalah *acid test* bagi ketahanan kesehatan publik, modal sosial serta sistem tata kelola pemerintahan (Modjo, 2020).

Keadaan Sumatera Utara yang dilanda *Covid-19* berdampak secara signifikan pada sektor kesehatan, sosial, ekonomi hingga pendidikan. Di sektor kesehatan, cepatnya penyebaran virus menyebabkan tingginya jumlah korban yang terpapar virus sementara kondisi rumah sakit tidak mampu menampung lonjakan pasien sehingga mengharuskan sebahagian pasien dirujuk kerumah sakit pusat. Permasalahan lain juga terdapat pada tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas jumlah dokter yang memiliki kompetensi pada penanganan virus *Covid-19* yang kemudian berpengaruh pada keterlambatan penanganan pada pasien.

Di sisi lain, Sumatera Utara dihadapkan pada kenyataan bahwa belum tersedianya beberapa alat medis pada sejumlah rumah sakit, seperti tidak tersedianya laboratorium. Kelemahan yang terdapat pada sektor kesehatan di Sumatera Utara menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah pasien *Covid-19* (Dzulfaroh, 2021).

Di sektor ekonomi, terjadi krisis sehingga menyebabkan kontraksi pada perekonomian daerah. Diketahui dampak terberat terjadi pada sektor ekonomi yang melumpuhkan seluruh pergerakan perdagangan, baik dari sisi *demand* maupun dari sisi *supply*. Merosotnya ekonomi rakyat ditandai dengan menurunnya tingkat penjualan

sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bahkan hingga mencapai 80%. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Sumatera Utara Kusmana Hartadji pada saat rilis resmi Tim Humas Sumatera Utara (Tempo, 2021). Selain itu, tidak sedikit perusahaan yang menutup usaha karena mengalami kerugian sehingga menyebabkan menjamurnya pengangguran di Sumatera Utara.

Banyaknya perusahaan industri seperti pariwisata dan kuliner yang menutup usahanya berakibat pada menurunnya jumlah pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya penyumbang terbesar pendapatan daerah Sumatera Utara bersumber dari pajak industri. Kemudian, sektor-sektor penunjang pariwisata seperti restoran, hotel maupun usaha-usaha retailikut terpengaruh. Hotel-hotel mengalami penurunan pendapatan hingga 40% sehingga hal tersebut tentu berdampak pada ekonomi rakyat (Azanella, 2021). Pertumbuhan ekonomidi Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,44% sebagai dampak Covid-19. Realisasi pendapatan pada akhirnya juga melemah, sementara anggaran belanja daerah semakin tinggi, bahkan daerah harus menganggarkan sejumlah biaya yang besar untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan dalam rangka penanggulangan virus *Covid-19* (Hendratto, 2020).

Berdasarkan keadaan tersebut maka sangat diperlukan strategi pemulihan ekonomi kearah yang lebih baik melalui program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan-pembangunan yang menjadi fokus daerah. Maka, untuk menjawab permasalahan di atas sangat dibutuhkan adanya sebuah kajian yang melahirkan sebuah solusi yang bersifat membangun untuk pemulihan ekonomi rakyat (UMKM) di Sumatera Utara.

Adapun pertanyaan penelitian dalam kajian ini yaitu bagaimana pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah Sumatera Utara melalui kerjasama BUMD dan UMKM. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan seluruh sektor penerimaan daerah di Sumatera Utara. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah seperti apakah strategi kerjasama yang dapat dilakukan oleh BUMD dan UMKM sehingga pemulihan ekonomi dapat segera dirasakan.

Dalam memperjelas posisi penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif strategi penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM dan BUMD dengan *locus* penelitian Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dilakukan pada September 2020 hingga April 2021.

Strategi pemulihan ekonomi adalah cara-cara inovatif yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Penurunan kondisi ekonomi rakyat akibat pandemi Covid-19 menyatakan bahwa gagalnya pemerintah daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi masalah ekonomi. Sehingga dengan demikian diperlukan suatu strategi dorongan agar ekonomi rakyat terselamatkan (Sutrisno, 2020). Strategi pemulihan ekonomi yang dapat dilakukan yakni pengoptimalan pada sektor UMKM dan BUMD. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan kerjasama lembaga antara BUMD dan UMKM. Kolaborasi tersebut menjadi suatu kebijakan yang solusional, melihat peran UMKM sebagai penyumbang yang

cukup besar terhadap PDB yakni 61% sehingga akan menyerap 97% tenaga kerja (Kolaborasi Untuk UMKM Indonesia, 2020).

Berdasarkan Siaran Pers Nomor PR-57/S.MBU./8/2020 tentang Kolaborasi untuk UMKM Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2020, disampaikan bahwa adanya kesepakatan bersama antara kementerian BUMN dengan Kementerian KUMKM untuk bekerjasama dalam upaya membantu pemulihan ekonomi serta sebagai salah satu bentuk pengembangan UMKM.

Pada dasarnya kerjasama dapat dilakukan dalam pendampingan dan pengembangan SDM, penyediaan bahan baku produksi, logistik, pemasaran dan produksi produk. Dalam hal produk yang akan dipasarkan maka dapat dilakukan dengan memproduksi produk halal, baik dalam bentuk makanan, kerajinan tangan maupun produk kesenian lainnya. Hal ini melihat bahwa potensi provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu industri pariwisata, dengan demikian produk halal dapat dijadikan salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Memproduksi produk halal sebagai salah satu bentuk kerjasama sangat optimal dilakukan melihat tingginya permintaan publik terhadap produk halal. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya jaminan bagi masyarakat bahwa produk yang diperdagangkan merupakan produk yang baik sebab terdapat standarisasi kehalalan yang memberikan jaminan bagi para konsumen.

Ruang lingkup kerjasama dilakukan pada produksi dan pemasaran produk halal. Produk halal menjadi minat masyarakat mengingat Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Selain itu perkembangan permintaan pasar oleh konsumen non muslim juga semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk halal sebab konsumen non muslim percaya bahwa dalam suatu produk halal terdapat jaminan kualitasnya. Hal ini menjadi suatu alasan mengapa produk halal menjadi strategi pengembangan UMKM dan BUMD. Dengan meningkatnya pengembangan UMKM juga BUMD maka pemulihan ekonomi dapat tercapai dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara dapat terlaksana sesuai target.

Target percepatan pemulihan ekonomi akan dapat tercapai dengan cepat apabila dilakukannya kerjasama atau kolaborasi 2 (dua) lembaga yakni BUMD dan UMKM dibandingkan kedua lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri. Betapa tidak, untuk mendorong pengembangan UMKM dapat didukung oleh BUMD, baik dari segi pengembangan SDM, metode pemasaran serta aspek lainnya. Dengan demikian melalui kerjasama maka akan tercapai beberapa tujuan yaitu pemulihan ekonomi segera tercapai, pengembangan UMKM terlaksana dengan baik serta tercapainya stimulus respon antara BUMD dan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat.

METODE

Pokok gagasan dari penelitian ini adalah analisis strategi dalam pemulihan ekonomi di provinsi Sumatera Utara. Strategi yang disarankan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* di Sumatera Utara.

Dengan demikian, jenis penelitian dalam kajian ini ialah penelitian sosial ekonomi (*social economic research*) sehingga data diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan memeriksa dan menganalisis dokumen atau data yang berkaitan, baik diterbitkan secara resmi maupun yang terdapat dalam bahan cetakan baik yang berbentuk elektronik maupun fisik kemudian diperkuat dengan referensi dari berbagai jurnal-jurnal. Data yang terhimpun terbagi dalam dua bentuk yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti, sedangkan data sekunder adalah data pendukung atau tambahan yang membantu data primer dalam penguatan data yang telah didapatkan (Sugiyono, 2015). Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan jenis penelitian pustaka yaitu melalui pengumpulan data literatur tertulis yang terdiri dari buku tentang kesejahteraan masyarakat dan jurnal/artikel yang berkaitan. Seluruh data yang diperoleh kemudian diidentifikasi lalu diklasifikasikan berdasarkan data-data yang relevan dengan masalah penelitian. Pengklasifikasian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi (Rianto, 2004). Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung tanpa adanya manipulasi data. (Rambe, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Covid-19 di Indonesia

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa corona virus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada dasarnya virus *Covid-19* menyebabkan penyakit flu biasa namun dapat menjadi penyakit berbahaya seperti sindrom pernapasan (Hanoatubun, 2020). Penyebaran virus *Covid-19* ini begitu cepat bahkan hingga lintas negara, sampai saat ini terdapat kurang lebih 216 negara yang telah mengkonfirmasi terkena virus *Covid-19*. Merujuk data Kementerian Kesehatan bahwa, pertama kalinya virus *Covid-19* muncul di Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya pernyataan “*urgent notice on the pneumonia of unknown cause*” (Hanoatubun, 2020).

Di Indonesia, penyebaran virus *Covid-19* dirasakan sejak bulan Maret 2020 dan tetap berlanjut hingga hari ini. Berdasarkan pengumuman Presiden Joko Widodo, masuknya virus *Covid-19* di Indonesia disebabkan adanya warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan salah satu warga negara Jepang (News, 2020).

Berdasarkan data yang diumumkan Satgas Penanggulangan *Covid-19* melalui website resminya <https://covid19.go.id/>, bahwa hingga 28 Agustus 2020 pasien positif berada pada angka 169.195 jiwa, pasien sembuh sebanyak 122.802 jiwa dan korban meninggal sebanyak 7.261 jiwa (Gugus Tugas dalam Penanganan Covid-19., 2020). Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif nampaknya masih menunjukkan trend peningkatan meskipun hal itu juga dipengaruhi oleh kapasitas tes setiap harinya.

Status kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia telah meningkat dan meluas, maka dari itu pemerintah mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk membatasi aktivitas

sosial di luar rumah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penanggulangan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan jumlah pasien *Covid-19* semakin menurun (Hidayat, 2020).

Di tengah kerisauan dan kekalutan masyarakat dalam menghadapi keterpurukan ekonomi, pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan stimulus, seperti kebijakan Bank Indonesia dalam memberikan injeksi liquiditas yang mencapai Rp.769,60 triliun (B. Indonesia, 2021). Peningkatan implementasi kebijakan stimulus lanjutan dilakukan pula oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No.48/POJK.03/2020 dengan pokok-pokok kebijakan memberikan tambahan kredit baru kepada debitur terdampak *Covid-19*.

Sumatera Utara sebagai daerah yang terbuka tidak dapat dielakkan lagi bahwa mewabahnya *Covid-19* menimbulkan banyak dampak negatif di beberapa sektor, baik itu sektor kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi.

Kebijakan PSBB yang wajib diikuti oleh masyarakat berdampak negatif pada sektor sosial di Sumatera Utara. Pemberlakuan PSBB menyebabkan kerusakan pada tatanan sosial hingga mempengaruhi keadaan klinis masyarakat. Oleh sebab itu PSBB berdampak negatif bagi relasi atau hubungan antar masyarakat. Risiko klinis dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketakutan, kepanikan dan saling tidak percaya antar sesama. Keadaan tersebut diperburuk dengan lemahnya keterbukaan informasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di awal pandemi, sehingga masyarakat mulai tertekan secara emosional (Nugraha, 2020).

Dampak *Covid-19* dirasakan pula dalam dunia pendidikan di Sumatera Utara. Mewabahnya *Covid-19* memaksa dilakukannya penutupan lembaga pendidikan sebagai upaya untuk menghambat penyebaran virus. Metode pembelajaran yang diberlakukan di setiap tingkatan dilakukan secara *daring (online)*. Bersekolah dari rumah menjadi hal baru bagi pelajar maupun mahasiswa.

Proses belajar yang dilakukan secara *online* tentunya perlu didukung oleh sejumlah fasilitas yang mumpuni seperti *gadget*, laptop atau komputer dan hal-hal pendukung lainnya. Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah tidak semua peserta didik didukung oleh alat teknologi. Masalah-masalah yang hadir tersebut pastilah akan menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran. Tidak sedikit pula lembaga pendidikan yang tidak memiliki sarana dan prasarana pembelajaran *daring* karena kondisi daerah yang tidak mendukung teknologi (Aji, 2020).

Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama dibalik permasalahan ini. Keadaan ekonomi masyarakat tidak mampu memenuhi seluruh sarana penunjang belajar *daring (online)*, bahkan ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang belum memiliki akses internet. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang krusial. Disamping itu ketidaksiapan anggaran belanja daerah untuk pengadaan seluruh perangkat penunjang pendidikan dimasa pandemi perlu dikoreksi (Agus, 2020). Terpuruknya dunia

pendidikan akibat *Covid-19* ini akan melahirkan *input* dan *output* yang buruk bagi keberlanjutan pendidikan di Sumatera Utara.

Selanjutnya bidang yang terdampak adalah bidang kesehatan. Di tengah pandemi *Covid-19* sektor kesehatan menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam penanganan korban jiwa akibat penyebaran *Covid-19*. Korban yang terus bertambah tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa, namun dari kalangan dokter juga berguguran akibat pandemi. Terbaru, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menginformasikan bahwa hingga awal Januari 2021 terdapat 237 dokter yang meninggal saat bertugas melawan *Covid-19*. Tercatat sekitar 65% dokter meninggal berada di pulau Jawa dengan kisaran 59.3% berusia lanjut dan selebihnya berusia kurang dari 50 tahun (Prawira, 2021). Banyaknya rumah sakit yang belum siap menjadikan sektor kesehatan semakin kewalahan, jumlah dokter yang sedikit juga menjadi hal besar yang harus dihadapi. Di lain sisi masih terdapat masyarakat yang abai pada protokol kesehatan.

Pada dasarnya peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menekan penyebaran virus *Covid-19* melalui *social distancing*, *lockdown*, karantina wilayah, menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, *handsanitizer*) dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Cara yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah tetap berada didalam rumah (Syafri dkk, 2020). Seluruh upaya yang dilakukan perlu didorong oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara karena sudah selayaknya hak atas kesehatan diberikan oleh pemerintah daerah selaku wakil rakyat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya.

Selain sector kesehatan, yang tak kalah *urgent* adalah sektor ekonomi. Tak hanya Sumatera Utara bahkan perekonomian dunia diprediksi akan mengalami penurunan hingga -3% atau mengalami resesi. Virus *Covid-19* menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan bahkan lebih parah dibandingkan krisis keuangan pada tahun 2008-2009¹. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang telah diproyeksikan meningkat akhirnya mengalami depresi hingga -3. Penurunan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya jumlah pengangguran terbuka berujung pada risiko dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. (Laila Afni Rambe, 2022)

Diberlakukannya PSBB mengakibatkan sistem logistik atau pangan menjadi terganggu. Keadaan masyarakat yang setiap hari berada dalam rumah tentu berimplikasi pada peningkatan konsumsi pangan masyarakat sehingga akan berpengaruh pula pada ketersediaan pangan nasional (Ariani, 2020). Kenaikan permintaan terhadap bahan pangan rata-rata rumah tangga sebelum pandemi *Covid-19* mencapai 78,7 kg/kapita/tahun sedangkan setelah dilakukannya PSBB permintaan pangan mencapai 80,4 kg/kapita/tahun (BPS, 2020).

¹ Krisis keuangan pada tahun 2008-2009 dikarenakan guncangan ekonomi Amerika sebagai akibat krisis kredit perumahan bermutu rendah (kasus subprime mortgage) yang berimbas pada krisis sector finansial. Hal ini ditandai dengan banyak lembaga keuangan yang gulung tikar. Resesi ini tidak hanya dirasakan oleh Amerika saja namun negara-negara lainnya juga berdampak termasuk Indonesia. Dampak mencolok yang paling dirasakan yakni merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US, menurunnya indeks harga saham hingga berpengaruh terhadap dunia perbankan karena kesulitan likuiditas. Lihat Iman Sugema, 2008-2009 Global Financial Crisis and Its Implications on Indonesian Economy, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) Desember 2012 Vol. 17 No. 3. Hlm. 146.

Disisi lain, kondisi iklim yang tidak stabil juga mempengaruhi produktivitas tanaman petani yang cenderung menurun bahkan gagal panen, sehingga berimplikasi pada pendapatan petani. Adanya ancaman-ancaman tersebut berdampak pada perekonomian daerah sebab terjadi penurunan ekspor bahan-bahan pokok yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan (Hermansyah, 2021). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan nilai ekspor pada bulan Agustus 2020 mencapai US\$13,07 miliar atau menurun 4,62%. Nilai ekspor nonmigas pada bulan Agustus 2020 mencapai US\$12,46 miliar atau turun 4,35%. Apabila dihitung secara kumulatif, nilai ekspor Januari-Agustus 2020 mencapai US\$103,16 miliar atau menurun 6,51% dibanding periode tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Keadaan tersebut tentu akan mengurangi pendapatan daerah dari sektor ekspor bahan pertanian, bahkan terhadap UMKM dan BUMD. Pasokan bahan baku dari sisi *supply* menjadi terganggu bahkan *supply* tidak begitu terserap karena adanya kebijakan PSBB yang menyebabkan jumlah produksi menurun. Begitu juga dari sisi *demand*, adanya *lockdown* membuat daya beli konsumen menurun (Kacaribu, 2020).

Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah. Pajak yang diterima dari sektor pariwisata tentu tidak selalu stabil seperti biasanya. Pemberlakuan PSBB pada bidang pariwisata dan sektor pendukung lainnya terganggu sehingga penerimaan pajak terbatas. Pemasukan dari penyelenggaraan *event-event* juga berkurang sebab adanya larangan keramaian. Penutupan berbagai tempat wisata juga mempengaruhi pendapatan dari sektor perhotelan dan restoran di Sumatera Utara, sehingga pajak terhadap dunia usaha tersebut tidak lagi diterima oleh daerah.

Dampak dari penyebaran virus ini juga dirasakan di sektor investasi, banyak investor baik asing maupun lokal yang enggan berinvestasi. Hal ini disebabkan karena tingginya resiko dan akhirnya berimbas pada aktivitas ekonomi. Kepanikan akibat dari pandemik *Covid-19* ternyata juga menyebabkan terganggunya pasar keuangan di Indonesia. Kinerja pasar uang dan saham setelah sebelumnya menurun tajam menyebabkan lemahnya nilai tukar rupiah (K. K. B. P. R. Indonesia, 2020).

Selama periode penyebaran virus *Covid-19* Januari hingga April terjadi *capital outflows* yang jumlahnya mencapai Rp.159,3 triliun dan sebagian besar merupakan surat berharga negara (SBN) yaitu senilai Rp.143,5 triliun atau 91% dari jumlah keseluruhan dan sebahagian lainnya terletak pada saham 7,4%, SBI 2,1% dan obligasi korporasi 0,4% (Haryanto, 2020).

Potensi kerugiandapat pula terjadi akibat faktor kejahatan atau kriminal (non-bisnis), pasalnya dengan angka pengangguran yang tinggi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan beberapa perusahaan mengakibatkan kesulitan ekonomi pada sejumlah keluarga. Akhirnya hal itu menimbulkan peningkatan tindak kejahatan bahkan perusakan fasilitas usaha (Wibowo Hadiwardoyo, 2020).

2. Pemulihan ekonomi Pasca Pandemi

Setelah masa PSBB dilonggarkan saat ini sudah mulai memasuki masa *new normal*. *New normal* adalah suatu kondisi baru dengan pola kehidupan baru oleh masyarakat yang

berbeda dengan masa sebelumnya. Keadaan *new normal* ini berkaitan dengan perilaku baru masyarakat dalam menghadapi virus *Covid-19*. Berdamai dan hidup berdampingan dengan virus *Covid-19* dilakukan masyarakat, hal ini bermakna bahwa adanya penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam segala aktivitas sehari-hari. Prinsip *new normal* adalah pola kehidupan masyarakat yang tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang telah disusun oleh Tim Gugus Tugas Penanganan *Covid-19*.

Saat ini sejumlah perkantoran dan aktivitas masyarakat kembali normal. Namun tidak untuk semua sektor, terdapat sektor-sektor tertentu yang masih tetap dilarang pemerintah untuk kembali beraktivitas normal. Contohnya pendidikan, hingga saat ini masih tetap dilakukan proses belajar melaludaring (*online*). Tetapi untuk beberapa perkantoran seperti pelayanan sosial, perusahaan keuangan dan beberapa usaha lainnya seperti mall dan tempat hiburan telah kembali dibuka dengan aturan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan yang bersifat solutif masih terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi,terlebih saat ini kas daerah sedang mengalami defisit akibat menurunnya pendapatan. Dengan demikian, kebijakan penanganan virus *Covid-19* diharapkan mampu menjaga keuangan daerah, disebabkan adanya ancaman resesi yang dapat melanda ekonomi masyarakat.

Dalam menjaga perlindungan sosial,Pemerintah Provinsi Daerah Sumatera Utara menganggarkan dana yang bersumber dari APBD. Pemberian bantuan-bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan sosial, pra kerja, diskon listrik dan pajak, logistik/pangan, Bantuan Langsung Tunai(BLT), dana desa hingga insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). APBD dianggarkan lebih besar dari sebelumnya mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang melemah sepanjang masa *Covid-19*.(Rambe, 2021).

Kerugian yang dialami oleh beberapa perusahaan daerah perlu diingatkan dan dievaluasi lebih lanjut mengingat bahwa Sumatera Utara membutuhkan bantuan BUMD untuk pemulihan ekonomi rakyat. BUMD yang selalu disusui oleh APBD sudah sewajarnya memberikan suntikan dana untuk peningkatan pendapatan daerah. Dengan tujuan memberikan *feedback* serta *output* yang baik bagi daerah. Namun ironisnya hari ini BUMD dalam keadaan rugi triliunan rupiah(Idris, 2019). Evaluasi yang seharusnya dilakukan adalah BUMD tidak perlu lagi mendapat dana APBD sehingga dana yang sebelumnya menjadi jatah BUMD dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif dan efektif.

Sebagaimana disampaikan oleh Arifin Soeria Atmadja (2013) pada saat mengajukan permohonan pengujian UU nomor 17 tahun 2013 di MK bahwasanya penggunaan APBD tidak efektif dan memiliki ketidakpastian sebab digunakan untuk menutup kerugian BUMD. Dengan demikian, ketika BUMD tidak mendapatkan dana APBDmaka BUMD akan lebih termotivasi dalam meningkatkan performa kinerja dan pelayanan serta ekspansi bisnisnya, sehingga mampu menarik para investor demi mendatangkan keuntungan yang lebih besar(Ilham, 2013).

Melemahnya perekonomian Sumatera Utara memberikan dampak yang buruk bagi seluruh sektor baik kesehatan dan pendidikan tidak terkecuali bidang sosial. Keadaan*Covid-*

19 yang semakin menunjukkan lonjakan pasien positif menggambarkan gagalnyanew normal di Indonesia.

BUMD memiliki peran strategis di tengah melemahnya perekonomian di tengah pandemi. Peran BUMD dapat dirasakan melalui inovasi dan kolaborasi sehingga pemulihan ekonomi dapat segera tercapai.

BUMD dan UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi di Sumatera Utara

Insight Center melaporkan saat ini terdapat perubahan omzet bagi para pelaku usaha akibat dari Covid-19. Tercatat sebanyak 63,9% para pelaku usaha mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dan sebanyak 31,7% pelaku usaha mengalami penurunan omzet kurang dari 30%. Hal ini menandakan perlunya suatu kebijakan pemulihan ekonomi disamping kebijakan yang telah dilakukan namun belum maksimal oleh pemerintah (Soleha, 2020).

Menggerakkan BUMD dan UMKM dengan memberikan kesempatan serta peluang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. UMKM yang selama ini bersaing dengan BUMD serta perusahaan besar lainnya, sangat efektif jika dilakukan kolaborasi dalam industri halal dengan demikian pemulihan ekonomi melalui UMKM produk halal dapat memberikan kekuatan terhadap ekonomi rakyat di Sumatera Utara.

Sumatera Utara merupakan daerah berkembang yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi pangsa pasar yang sangat besar sehingga dapat dijadikan pusat pengembangan industri halal. Berdasarkan hasil *study* oleh *Center of Reform on Economics Indonesia* (Core) mengatakan bahwa muslim dan registrasi halal mengalami peningkatan pada jumlah konsumen dan daya belanja masyarakat. Produk halal adalah seluruh produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Kamila, 2020).

Pada perkembangannya, labelisasi halal menjadi suatu simbol yang bermakna baik bagi seluruh konsumen muslim maupun non muslim. Bagi non muslim simbol suatu kehalalan suatu produk dimaknai bahwa produk atau jasa tersebut bersih, aman dan sehat. Dengan demikian potensi perkembangan produk halal UMKM tentunya berpeluang besar dalam peningkatan keuntungan.

UMKM merupakan sektor perekonomian mikro yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat umum. Hal ini kemudian semakin jelas saat keadaan Covid-19 sebab masyarakat tidak bisa melibatkan sektor industri atau kerjasama dengan pasar internasional. Dengan demikian dirasakan bahwa keadaan pandemi memberikan kesadaran bahwa UMKM merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Arifqi, 2021).

Pengembangan UMKM berdasarkan produk halal merupakan suatu jaminan untuk pertumbuhan ekonomi rakyat. Pemasaran secara global dapat dijangkau melalui impor produk halal yang berasal dari setiap UMKM. Peningkatan penjualan produk halal tentu menjadi hal yang menarik serta menjamin keberlanjutan pasar UMKM. Produk halal yang ditawarkan tentu berdaya saing sebab tingginya permintaan konsumen.

Seluruh produk milik UMKM tentunya memerlukan modal yang besar untuk pengembangan usaha yang dimiliki. Dengan demikian peran pemerintah daerah diharuskan ikut serta dalam peningkatan ekonomi rakyat.

Pada masa *postmodern* ini perkembangan teknologi menjadi pertimbangan yang kuat dalam pengembangan suatu usaha. Hal itu menjadi salah satu alasan bahwa gerakan digital *marketing* dapat dilakukan untuk meningkatkan pemasaran. Gerakan digital *marketing* menjadi suatu kebijakan unggul dengan memanfaatkan keadaan nasional yang masih dilanda pandemi. Gerakan ekonomi digital tentu akan menghemat biaya sehingga tidak diperlukan fasilitas yanghanya akan mengikis modal.

Pemasaran produk halal UMKM dapat dilakukan melalui *online* atau digital bisnis yang bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan informasi dan memudahkan konsumen untuk menjangkau seluruh produk halal yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah dan berkontak fisik dengan penjual.

Susanto (2020) menyatakan bahwa perlu disegerakan untuk melakukan rencana kerja atau *roadmap* untuk dapat memulai dan mengembangkan produk halal di Indonesia terkhusus Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan tujuan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPN). Menurut Global Islamic Finance Report (GIFR), penduduk muslim yang memiliki pendapatan *disposable* diperkirakan akan dapat memberikan pemasukan pada pasar produk halal lebih dari \$2 triliun dan sekitar \$3 735 triliun pada tahun 2019. Dengan demikian hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu rancangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Produk halal menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap ekonomi rakyat. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya. Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal.

Namun untuk mendorong percepatan perbaikan ekonomi masyarakat maka diperlukan dukungan industri-industri halal yang berasal dari BUMD dan UMKM, sehingga dengan peningkatan tersebut mampu memberikan suntikan dana yang lebih besar lagi terhadap daerah. Dengan demikian angka defisit pada neraca keuangan daerah akan teratasi. Bahkan, dapat pula dilakukan aktivitas ekspor terhadap produk halal di Sumatera Utara untuk mendorong perbaikan ekonomi.

Produk halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Maka sudah seharusnya produk halal terus dikembangkan di Sumatera Utara untuk mempercepat perekonomian masyarakat. Produk halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, Produk halal juga telah menyumbang USD 1 miliar investasi dari investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya. Bila dioptimalkan lagi, produk halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa daerah. Inovasi model bisnis mulai dari produk hingga ke pemasaran dapat dilakukan secara intensif melalui pemanfaatan perdagangan *e-commers*.

Disamping itu UMKM juga turut memanfaatkan media sosial untuk dapat menjangkau konsumen secara langsung sehingga dapat menekan biaya promosi (Adnyani, 2020).

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Toleransi beragama juga dapat dirasakan dari seluruh aktivitas masyarakat. Sebagai daerah wisata, banyak industri halal yang ditemukan di Sumatera Utara seperti pada sektor pariwisata, perhotelan, restoran dan berbagai produk makanan serta kerajinan. Kunjungan wisatawan domestik dan manca negara juga terus berdatangan, permintaan terhadap produk halal juga semakin meningkat.

Membangun industri halal BUMD serta meningkatkan produktivitas UMKM menjadi pilihan yang paling tepat untuk meningkatkan perekonomian daerah. Mulai dari mengelaborasi sejumlah UMKM, memberikan dukungan regulasi dan fasilitas modal, serta membantu pemasaran ditingkat nasional.

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui industri halal tentunya pemerintah perlu untuk memberikan sebuah digitalisasi *market* yang diseragamkan untuk seluruh UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dunia digital seoptimal mungkin untuk menunjang promosi kepada publik. Penggunaan digital *market* semakin meningkat sebab seluruh elemen masyarakat terpaksa untuk menjalankan transaksi ekonomi *online* dimasa pandemi.

Hal itu juga dirasakan dunia usaha beberapa tahun sebelumnya. Di Sumatera Utara sudah mulai banyak bermunculan sejumlah UMKM yang bersifat *e-commerce*. Seluruh dunia usaha juga sudah mempraktikkan transaksinya melalui *online*, mulai dari persiapan, pemasaran, dan penjualan yang dilakukan secara *daring*. UMKM juga harus mempersiapkan tantangan itu bahwa jauh kedepan seluruh aktivitas dapat dilakukan dengan *online* mengingat pesatnya perkembangan dunia digital saat ini.

Keefektifan digital *marketing* dapat dimanfaatkan oleh seluruh UMKM. Menggunakan digital *marketing* akan mempermudah para konsumen untuk berbelanja, bahkan pelaku usaha juga akan mampu memantau seluruh persediaan produk dan penjualan. Melalui digital *marketing* pula setiap produsen akan dapat menjangkau seluruh calon konsumen. Pemanfaatan digital *marketing* ini merupakan pilihan yang tepat untuk peningkatan penjualan produk.

Produk halal UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam memulihkan ekonomi dan sosial. Konsep digital *marketing* berawal dari dunia internet. Digital *marketing* adalah suatu aktivitas, institusi dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen serta pihak lainnya yang berkepentingan (Rs, 2017). Peran yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung UMKM melalui digital *marketing* adalah mempersiapkan wadah yang mampu menampung seluruh produk yang ditawarkan. Menampung bukan berarti UMKM menjualkan produknya kepada pemerintah daerah. Namun, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu membantu dalam mendukung hasil produksi UMKM yang tentunya agar dapat bersaing di pasar nasional maupun global.

Peran pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator dan stimulator diharapkan dapat menciptakan pengembangan ekonomi rakyat (Permana, 2020). Sebagai bentuk realisasi

maka pemerintah perlu menyediakan penyangga produk UMKM, khususnya dibidang pertanian, perikanan, kuliner dan industri rumah tangga. Dengan demikian akan tercipta kepastian terserapnya produk UMKM sehingga perputaran persediaan juga lebih baik. Kebijakan ini terasa lebih efektif apabila diikuti dengan penyediaan fasilitas *e-commerce* yang digerakkan oleh pemerintah daerah (Sutrisno, 2021).

Dukungan yang diberikan dari segi digitalisasi *market* dapat dilakukan dengan mengadakan pembekalan yang bersifat edukasi terkait dengan *support system* penggunaan digital *marketing*. Kegiatan pembekalan teknologi akan sangat membantu sebab tidak seluruh pelaku usaha mengerti penggunaan digital *marketing*. Pada tahap awal dapat diadakan pengenalan terhadap dunia digital, selanjutnya diberikan sarana atau prasarana yang dapat menunjang peningkatan produksi (Taryudi, 2021).

Dukungan pemerintah daerah juga dapat dilakukan dengan meminimalkan produk impor ketika produk tersebut tersedia di daerah sendiri. Dengan tidak mengimpor produk maka masyarakat dapat mengkonsumsi produk UMKM sehingga permintaan juga semakin besar. Hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kesempatan bagi UMKM tumbuh dan berkembang.

Memperkuat UMKM tentu tidak cukup dengan berperan dalam pemasaran semata. Hal yang tak kalah penting adalah bantuan modal oleh pemerintah daerah. Modal begitu esensial untuk setiap pergerakan UMKM, untuk mendukung digital *market* yang telah direncanakan. Pelaksanaan seluruh rencana memerlukan modal yang besar. Lambatnya pertumbuhan disebabkan kemandirian modal UMKM yang tidak menerima anggaran dari pemerintah dan keterbatasan gerak laju pemasaran

Setiap UMKM kesulitan mendapatkan akses kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman modal. Keluhan keluar dari berbagai UMKM yang mengaku kerap kali terbentur akses yang sulit pada saat melakukan pinjaman kepada bank. Kurangnya ketidakpercayaan bank kepada UMKM dalam mengembalikan pinjaman menjadi salah satu alasan hingga bantuan modal dari bank sulit didapatkan. Perbankan menilai bahwa dalam menjalankan usahanya UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya, SDM yang kurang mumpuni juga menjadi alasan penolakan tersebut. Sampai saat ini pembatasan pinjaman untuk UMKM tetap dilakukan karena khawatir akan terjadi kredit macet yang ujungnya akan merugikan bank itu sendiri.

Dalam hal ini peran serta perhatian diperlukan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan dukungan modal baik dalam bentuk simpan pinjam berbasis BUMD atau penguatan modal melalui penyediaan alat produksi. Pemerintah daerah juga perlu memberlakukan kebijakan yang dapat mendorong lembaga keuangan untuk melakukan *rescheduling* dan *refinancing* bagi pelaku usaha yang mengalami risiko pasar (Mufida, 2020).

Penguatan modal melalui pinjaman sangat dibutuhkan dalam mempercepat laju produksi, sehingga menjadi hal yang luar biasa bagi perekonomian nasional apabila seluruh UMKM lebih diprioritaskan. Dengan demikian seluruh UMKM dapat berkolaborasi dengan seluruh BUMD yang selanjutnya mampu mengurangi tingkat pengangguran melalui ketersediaan lapangan kerja.

Melalui pengembangan produk halal UMKM kemudian didukung peran pemerintah daerah maka dapat memberikan pemulihan ekonomi rakyat secara individu serta kolektif. Ketersediaan lapangan kerja dan perbaikan mutu produk halal UMKM akan terus memiliki daya saing mengingat bahwa produk halal menjadi minat publik.

KESIMPULAN

Skenario pemulihan ekonomi Sumatera Utara dengan melakukan percepatan penanganan Covid-19 melalui adaptasi kebiasaan baru (AKB), pemulihan ekonomi dengan penyelamatan dan penormalan serta penggunaan dana pinjaman daerah ternyata belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam perbaikan ekonomi Sumatera Utara. Pasalnya pertumbuhan ekonomi PDRB Sumatera Utara pada Triwulan II-2020 terkontraksi hingga 5,98% (yoy), kemudian dari sisi lapangan usaha sebagai penyumbang penerimaan daerah terjadi penurunan aktivitas produksi akibat dampak Covid-19 sehingga ekonomi menjadi semakin terkontraksi. Penurunan ekonomi Sumatera Utara dikonfirmasi oleh data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara bahwa pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2020 berada di luar rentang target rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumatera Utara yang semula ditargetkan 5,4% s.d 5,7% disesuaikan menjadi -2,1% s.d 2,3%. Evaluasi terhadap kebijakan yang kurang optimal perlu dilakukan dengan strategi lainnya seperti optimalisasi BUMD dan UMKM. Pengoptimalan dilakukan melalui kerjasama 2 (dua) lembaga yaitu BUMD dan UMKM, dengan ruang lingkup kerjasama concern pada produksi produk halal serta pemasarannya. Pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan keduanya akan mampu mendorong perbaikan ekonomi Sumatera Utara. Disamping itu pemerintah perlu memberikan dukungan modal melalui pinjaman serta memberi kesempatan bagi setiap UMKM untuk bersaing dengan seluruh perusahaan besar lainnya. Tak hanya itu pemerintah daerah juga harus mengeluarkan suatu kebijakan penyederhanaan regulasi berupa penyederhanaan izin bagi setiap UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Taryudi, Dziky Maulana, dkk. (2021). Economic Recovery for Local UMKM Families Through Improved Product Packing and Online Marketing in PandanganJaya Village, Indramayu Regency. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 3(1), 28.
- Aditya Eka Prawira. (2021). 237 Dokter di Indonesia Meninggal karena Virus Corona COVID-19. <https://www.liputan6.com/health/read/4447499/237-dokter-di-indonesia-meninggal-karena-virus-corona-covid-19>
- Agung Nugraha. (2020). *Bangkitnya Solidaritas Sosial di Tengah Bencana Krisis Covid-19*. 3.
- Agus Purwanto, Rudy Pramono, dkk. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal Of Education, Psychology and Counseling*, 2(1).
- Ahmad Naufal Dzulfaroh. (2021). *Kapasitas Rumah Sakit Mulai Kritis, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?*

- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/08/111409565/kapasitas-rumah-sakit-mulai-kritis-apa-yang-harus-dilakukan-pemerintah?page=all>.
- Ariani, M. dkk. (2020). Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Distribusi dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Mewa Ariani¹, Adi Setiyanto², Tri B. Purwantini². *Litbang Pertanian*, 2(2), 3.
<https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/22-BBRC-2020-III-3-5-MEWA.pdf>
- Arin Ramadhiani Soleha. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 174.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). *Ekspor Agustus 2020 Mencapai US\$13,07 Miliar dan Impor Agustus 2020 sebesar US\$10,74 Miliar*.
- Badan Pusat Statistik. (2020b). *Permintaan pangan (kg/kapita/tahun) sebelum dan sesudah*.
- Dedi Purwana Rs, dan D. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (PMM)*, 1(1), 17.
- Djoko Hendratto. (2020). *Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2020*.
- Edy Sutrisno. (2020). Post-Pandemic Economic Recovery Strategy Through The Umkm and Tourism Sector. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 642.
- Evita Farcha Kamila. (2020). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal. *Liquid*, 1(1), 5.
- Febrio Kacaribu, K. B. K. F. (2020). *Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. 16–17.
- Gugus Tugas dalam Penanganan Covid-19. (2020). *Gejala Covid-19*. <https://covid19.go.id>
- Haryanto, K. P. P. N. R. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 152.
- Hermansyah. (2021). *Ketahanan Pangan dan UMKM Jadi Prioritas Pemulihan Ekonomi Jabar*. <http://humas.jabarprov.go.id/ketahanan-pangan-dan-umkm-jadi-prioritas-pemulihan-ekonomi-jabar/3651>
- Ilham. (2013, May). Masuknya Keuangan BUMN/BUMD dalam Keuangan Negara Bebani APBN. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2.
- Indonesia, B. (2021). *Optimalkan Kebijakan Stimulus, Percepat Pemulihan Ekonomi*.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2020). *Pentingnya RUU Cipta Lapangan Kerja Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19*.
- Indra Dwi Permana. (2020). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan). *Jurnal Publik: Untag-Sby*, 1(1), 78.
- Kolaborasi Untuk UMKM Indonesia, Pub. L. No. PR-57/S.MBU./8/2020, 1 (2020).
- Laila Afni Rambe. (2020). Islamic law review on use of Go-Pay in payment of Zakat. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 148.
- Laila Afni Rambe. (2021). *PENGUMPULAN DANA ZAKAT MELALUI GO-PAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Laila Afni Rambe. (2022). Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah

- Rantau Prapat Nort Sumatera. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 5.
- Luthfia Ayu Azanella. (2021). *Saat Pandemi Covid-19 Berdampak pada Bisnis Perhotelan Saat Ini*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/26/102900465/saat-pandemi-covid-19-berdampak-pada-bisnis-perhotelan-saat-ini?page=all>.
- Mochammad Firman Hidayat. (2020). Strategi Penanggulangan peningkatan pengangguran dan pemulihan ekonomi nasional: perspektif makroekonomi dan jangka menengah. *Direktorat Perencanaan Makro Dan Analisis Statistic*.
- Moh. Musfiq Arifqi dan Dedi Junedi. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 194.
- Mohamad Ikhsan Modjo. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 104.
- Muhammad Idris. (2019). *Daftar 7 BUMN yang Tetap Rugi Meski Sudah Disuntik PMN*. <https://money.kompas.com/read/2019/12/21/142657926/daftar-7-bumn-yang-tetap-rugi-meski-sudah-disuntik-pmn>
- News, C. (2020). *Penyebaran Covid-19 di Indonesia*.
- Ni Ketut Sari Adnyani dan Dewa Ayu Eka Agustini. (2020). Digitalisasi Sebagai Pemulihan Perekonomian di Sektor Kerajinan dalam Mendukung Kebangkitan UMKM di Provinsi Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(2), 89.
- Rianto Adi. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Rizqon Aji. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah*, 7(5), 397.
- Saleha Mufida, C. T. dan S. D. W. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 129.
- Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal Of Education, Psychlogy and Counseling*, 2(1), 151.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Syafrida dan ralang Hartati. (2020). Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah*, 7(6), 10.
- Tempo.com. (2021). *Strategi Pemprov Jabar Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi*. <https://nusantara.tempo.co/nusantara/450/strategi-pemprov-jabar-bangkitkan-umkm-di-masa-pandemi>
- Wibowo Hadiwardoyo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2(2), 89.